
PENDIDIKAN KARAKTER ISLAMI DALAM KONTEKS MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Ratu Amalia Hayani

Jurusan PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: ratu.amalia69@yahoo.co.id

ABSTRAK

Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, hubungan antarkelompok masyarakat kerap diwarnai pelbagai konflik. konflik-konflik sosial tidak bisa ditekan dengan cara penyeragaman, tetapi harus ditempuh melalui proses edukasi, di antaranya dengan menanamkan dan mengembangkan pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Di antaranya melalui Pendidikan Agama Islam, khususnya akhlak, dalam rangka mengembangkan karakter peserta yang islami. Namun demikian, pendidikan karakter islami, yang tidak hanya menyajikan serangkaian doktrin dalam pembelajaran akhlak, tapi harus dikontekstualisasikan agar relevan dengan keadaan dan persoalan masyarakat Indonesia, yang tengah berproses menuju masyarakat kultural.

Kata kunci: Pendidikan karakter; Karakter Islami; Masyarakat multikultural

ABSTRACT

In a pluralistic society like Indonesia, relations between groups of people are often colored by various conflicts. Social conflicts cannot be suppressed by uniformity, but must be pursued through an educational process, including by harmonization and developing character education at schools through Islamic Religious Education, especially morals, in order to develop the character of Islamic participants. However, Islamic character education, which not only presents a set of doctrines in moral learning, but must be contextualized to be relevant to the conditions and issues of Indonesian society, is in the process of being directed towards a cultural society

Keywords: Character education; Islamic character; Multi-cultural society

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, Sentimen-sentimen baik yang berbasis etnik, berbau kedaerahan, maupun agama kerap muncul ke permukaan. Hal ini bukan saja menghambat ke arah persatuan Indonesia, tetapi juga bisa mengubur *nation-state* dengan Bhineka Tunggal Ika-nya. Kecemasan semacam ini bukan tanpa alasan, karena hampir dalam dua dasawarsa terakhir ini rongrongan dan ancaman terhadap keberlangsungan negara-bangsa yaitu NKRI yang

berideologi Pancasila, sepertinya tidak pernah surut. Mulai dari konflik yang bernuansa etnik maupun agama, sampai tindakan-tindakan intoleransi dan diskriminasi. Dalam sebuah negara yang masyarakatnya heterogin seperti Indonesia, pertentangan akan selalu muncul, dan sulit bagi kita untuk menghindarinya. Dengan kata lain, kemajemukan harus diterima sebagai kenyataan, dan disertai dengan sikap yang positif.

Sudah menjadi takdir Tuhan, Indonesia terdiri dari berbagai kelompok suku bangsa, etnis, bahasa, dan agama, yang mendiami ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke, dengan kondisi daerah, alam dan geografis yang berbeda-beda. Dalam masyarakat majemuk, hubungan antarkelompok masyarakat kerap diwarnai pelbagai konflik. Ini terjadi karena sentimen kesukuan atau ke-etnisan begitu kental, yang disebut oleh Clifford Geertz, seperti dikutip Nasikun, sebagai sentimen primordialisme. Bahkan akibat sentimen primordialisme ini, beberapa kelompok ingin memisahkan diri. Keinginan untuk memisahkan diri itu semakin kuat manakala unsur-unsur dalam primordialisme itu bersatu, yaitu unsur etnis, bahasa, daerah dan agama. Pengelompok-pengelompokan dalam masyarakat yang tercermin dalam sub-sub budaya mempengaruhi atau melahirkan rasa percaya (*trust*) atau permusuhan" (*hostility*). Jika yang menonjol adalah rasa permusuhan maka tingkat budaya politik dalam masyarakat tersebut belum matang. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, kesediaan untuk mempersempit ruang gerak ikatan-ikatan primordial melalui tindakan-tindakan sukarela dari semua komponen.

Pluralitas atau kebhinekaan masyarakat Indonesia, seperti sudah

disinggung, merupakan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin ditolak karena sudah menjadi bagian dari *sunnatullah*. Sebagai konsekwensi dari kenyataan tersebut, *pertama*, kita harus menerima perbedaan-perbedaan di atas itu dengan sikap yang positif, yakni bersikap terbuka, toleran, fair, serta tidak diskriminatif. Namun demikian, pluralitas masyarakat Indonesia sesungguhnya tidak unik, atau istimewa karena pada dasarnya di dunia ini sudah tidak ada lagi tempat, kota, atau negara yang benar-benar eksklusif, dari segi agama misalnya, kecuali Madinah dan Mekah, serta Vatikan kecuali atas (Nurholish Madjid, 1992:160). Kalaupun dikatakan unik, keragaman di Indonesia bukan hanya dari segi agama dan kepercayaan, etnis dan sub-etnik, tetapi juga budaya dan bahasa lokal. Sebuah kekayaan yang boleh dikatakan tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa dan negara-negara lain.

Kedua, dalam masyarakat majemuk, hubungan antarkelompok masyarakat kerap diwarnai pelbagai konflik. Ini terjadi karena sentimen kesukuan atau ke-etnisan begitu kental, yang disebut oleh Clifford Geertz, seperti dikutip Nasikun, sebagai sentimen primordialisme. Bahkan akibat sentimen primordialisme ini, beberapa kelompok ingin memisahkan diri. Keinginan untuk

memisahkan diri itu semakin kuat manakala unsur-unsur dalam primordialisme itu bersatu, yaitu unsur etnis, bahasa, daerah dan agama. Dengan lain perkataan, konflik etnis, konflik antarumat agama, dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, bukan saja bukan sesuatu yang sudah sering kali terjadi, tetapi akan terus terjadi. (Nasikun, 1995:32-33). Beberapa contoh bisa dikemukakan, antara konflik antar etnis di Sambas (Kalimantan Barat) dan Sampit (Kalimantan Tengah) yang melibatkan suku Dayak dan etnis Madura; konflik antar pemeluk agama di Ambon dan Poso; dan konflik antara etnik Papua dan warga pendatang di beberapa kota di Papua pada tahun 2019.

Ketiga, konflik-konflik sosial tidak bisa ditekan dengan cara penyeragaman, tetapi harus ditempuh melalui proses edukasi, di antaranya dengan menanamkan dan mengembangkan pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Praktik pendidikan, tentu harus diikuti dengan sebuah politik pengelolaan yang disebut multikulturalisme. Dengan demikian, maka masyarakat majemuk (*plural society*) bisa diubah menjadi masyarakat, multikultural (*multicultural society*). (Hikmat Budiman; 2009, 246)

Islam mendorong kesadaran kepada para pemeluknya untuk hidup bersama, bertetangga dengan orang lain yang berasal dari budaya, kelompok etnik, dan agama yang berbeda, untuk memperluas horison sosial (hidup berdampingan); bekerja sama, menerima dan memberi, dan siap untuk berkorban. Setelah saling mengenali, langkah berikutnya adalah saling memahami, dan saling menghormati. Dalam relasi antarmanusia juga dituntut adanya rasa saling percaya, berbaik sangka, dan bersikap toleran. Nilai-nilai semacam itulah yang mesti dikembangkan dalam tata pergaulan masyarakat multikultural. (Nurcholish Madjid, 1992:190-192).

Pendidikan, sebagai upaya untuk membangun karakter, mempunyai makna yang lebih tinggi dari pendidikan moral. Sebab pendidikan karakter bukan sekadar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan mengenai hal yang baik sehingga peserta didik bisa membedakan mana yang baik dan salah, mampu merasakan nilai yang baik dan mau melakukannya. Kepribadian memang erat kaitannya dengan kebiasaan yang terus menerus dipraktikkan.

Kebiasaan berbuat baik tidak selalu menjamin bahwa manusia yang

telah terbiasa tersebut secara sadar menghargai pentingnya nilai karakter. Karena mungkin saja perbuatannya tersebut dilandasi oleh rasa takut untuk berbuat salah, bukan karena tingginya penghargaan akan nilai itu. Misalnya saja ketika seseorang berbuat jujur, hal itu dilakukan karena ia takut dinilai oleh orang lain, bukan karena keinginannya yang tulus untuk menghargai nilai kejujuran itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam pendidikan karakter diperlukan juga aspek emosi. Jadi selain memahami nilai kebaikan juga ada hasrat dan cinta untuk mempraktikkannya.

Berdasarkan paparan di atas, dalam konteks merawat dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang multikultural, apa nilai-nilai akhlak, moral, etika, yang bisa diambil dari ajaran Islam untuk membentuk karakter Islami pada peserta didik?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan tekstual yang mengkaji kandungan unsur tertentu dalam wacana keislaman para cendekiawan Muslim Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif karena cara kerja dan data yang diperoleh berupa data verbal serta diolah

dengan logika kualitatif. Subjek penelitian adalah tulisan-tulisan cendekiawan yang terkait dengan persoalan-persoalan akhlak, moral, etika di dalam Islam yang menjadi insur-unsur karakter islami.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Masyarakat Multikultural

Parekh dalam Azra (2007: 13), menyebut bahwa masyarakat multikultural adalah sebuah masyarakat yang terdiri atas beberapa. Atas dasar itu ia mendefinisikan tentang masyarakat multikultural sebagai suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat serta kebiasaan (*"A Multicultural society, then is one that includes several cultural communities with their overlapping but none the less distinct conception of the world, system of meaning, values, forms of social organizations, histories, customs and practices"*).

Model masyarakat multikultural sebenarnya sudah disain oleh bapak-bapak pendiri bangsa (*founding*

fathers), yang disebutnya kebudayaan bangsa, sebagaimana yang termaktub pada penjelasan Pasal 32 UUD 1945: “kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan daerah” dan sasanti Bhineka Tunggal Ika. Dengan demikian, maka sebagai model, maka masyarakat multikulturalis atau bhineka tunggal ika yang multikultural, yang melandasi struktur masyarakat Indonesia pada tingkat nasional dan lokal. (Parsudi Suparlan, 2005: 224-225).

Betapapun, harus dibedakan antara masyarakat plural dan masyarakat multikultural. Sebab, dalam masyarakat multikultural yang ditonjolkan bukan sekadar adanya pengakuan mengenai keanekaragaman secara sukubangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, tetapi menekankan adanya kesedrajan di antara budaya yang beragam tersebut, dan mereka didorong untuk saling bekerjasama. Menurut Rosado, dalam masyarakat plural sebuah sistem kepercayaan dan perilaku yang mengakui dan menghargai kehadiran beragam kelompok dalam kesatuan masyarakat luas, menerima perbedaan sosio-kultural mereka, serta memberdayakan

dan mendorong kontribusi mereka melalui penerapan budaya inklusif dalam masyarakat yang lebih luas. (Caleb Rosado, 1996:2).

Dari perspektif Islam, terdapat beberapa prinsip yang bisa dijadikan acuan dalam mengembangkan sebuah masyarakat multikultural. Pertama, prinsip keberagaman. Dalam Islam, keberagaman atau pluralitas (*ta'addud*) merupakan hukum alam (*sunnatullah*) yang tidak akan berubah dan tidak bisa ditolak. Secara gamblang Al-qur'an menyatakan bahwa manusia itu diciptakan dalam berbagai bangsa dan suku. (Q.S. 49: 13). Oleh karena itu, keanekaragaman ini harus diterima sebagai kenyataan yang mesti dihargai dan dipandang secara optimistis dan positif sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Tuhan. (Q.S. 30: 22). Bahkan, Alquran menyatakan bahwa perbedaan pandangan tidak harus ditakuti atau ditiadakan tetapi justru harus dijadikan titik tolak untuk berkompetisi menuju kebaikan. (Q.S. 5: 48).

Kedua, persamaan (*al-musawah*) atau kesetaraan. Menurut ajaran Alquran dari segi hakikat penciptaan, antara manusia yang satu dan manusia lainnya tidak terdapat perbedaan. Mereka semua sama, dari

asal kejadian yang sama, yaitu dari tanah, dari diriyang satu, yakni Adam yang diciptakan dari tanah. Karena itu, tidak ada kelebihan seorang individu atas individu lainnya. Oleh sebab itu pula, tidak layak seseorang atau satu golongan menyombongkan diri terhadap yang lain atau menghina yang lain. (Q.S. 49:13; 4: 1, 7: 189, 39: 6, 35: 11 dan 40: 67). Prinsip persamaan antarmanusia ini juga dijelaskan dalam hadis Nabi, antara lain sabda berikut: "Tidak ada kelebihan orang Arab atas nonarab, kulit putih atas kulit hitam, kecuali takwanya." (H.R. Bukhari). Islam mengakui bahwa manusia terdiri berbagai suku, ras, agama, bangsa, tetapi pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama atau setara (egaliter). Ketidaksamaan hanya dilihat dari segi kualitas moralitas mereka, dan itu pun hanya berlaku di hadapan Tuhan. Jadi, menurut Islam seseorang tidak dapat memberlakukan orang lain secara diskriminatif. Jadi, (Masykuri Abdillah, 1997:114).

Ketiga, kebebasan. Dalam Islam, kebebasan ini meliputi kebebasan beragama dan kebebasan berpikir. Kebebasan beragama adalah kebebasan paling fundamental dalam urusan sosio-politik kehidupan manusia. Kebebasan beragama, antara

lain pada QS.2: 256; QS. 18: 29; QS 88: 21-22. Ajaran agama Islam yang merupakan ajaran paling benar ternyata tidak dipaksakan. Rasulullah SAW sendiri selalu mengingatkan bahwa tugasnya hanya menyampaikan pesan Tuhan, tidak berhak memaksa seseorang untuk beriman dan mengikutinya. Di dalam Al-qur'an banyak dijumpai ayat-ayat yang menyuruh manusia untuk berpikir, yang berarti juga memberikan kebebasan berpikir. Namun, kebebasan ini mempunyai batas-batas tertentu, seperti kebebasan tersebut tidak mengganggu ketertiban umum dan didasarkan atas tanggung jawab. Dengan kata lain, kebebasan berpikir harus dipahami dalam pengertian yang positif. Kaidah ushul fiqih menyatakan: *hurriyat al-mar`i mahnûdah bi hurriyat siwahu* (kebebasan individu dibatasi oleh kebebasan orang lain). Prinsip ini juga berlaku dalam soal berpendapat dan bertindak.

Seperti dikemukakan Nurcholish Madjid (1992: cxxxii-cxxiv), kebebasan secara mengagumkan telah dipraktekkan di negara-negara yang tradisi demokrasi mapan. Dengan kebebasan itu pula manusia

bereksperimen dengan berbagai buah pikiran, dan dengan eksperimen-eksperimen di segala bidang diwujudkan. Namun demikian, tidak semua masalah teratasi. Kebebasan memang merupakan kunci bagi peradaban. Kebebasan tentu akan mendatangkan banyak manfaat kalau direalisasikan dalam sistem yang memberi peluang pengecekan terhadap bentuk-bentuk kecenderungan yang tak terkendali. Dan kecenderungan tak terkendali atas nama kebebasan inilah yang melahirkan banyak penyakit sosial di negara-negara Barat. Untuk itu diperlukan kebebasan politik dalam masyarakat yang memungkinkan terjadinya saling menjaga dan saling mengingatkan mengenai kebenaran dan kebaikan antarsesama warga.

Keempat, keadilan (*al-'adalah*). Dalam Islam, salah satu semangat dasar yang dibawa oleh Al-qur'an adalah keadilan bagi semua umat manusia. Sifat adil adalah satu jenjang menuju ketakwaan, suatu derajat manusia paling utama dan mulia di sisi Allah. Sementara keadilan adalah nilai dan semangat dari masyarakat yang ingin diwujudkan oleh Al-qur'an. Dalam Kitab Suci konsep keadilan (*'adl*) dikaitkan dengan Tuhan dan manusia.

Pertama menggambarkan tentang keadilan Tuhan (Q.S. 3: 18; 12: 80), dan kedua tentang keadilan manusia, yaitu anjuran agar manusia berlaku adil dalam setiap aspek, kepada Tuhan, manusia dan lingkungan. Agar dapat dikatakan adil kepada Tuhan, manusia harus menjadi saleh dan bermoral dan memenuhi tujuan penciptaannya, yaitu menyembah Tuhan. Agar dapat dikatakan adil kepada sesama manusia, manusia harus memberikan setiap haknya dan bertindak terhadap makhluk-makhluk tersebut sesuai dengan hak-hak mereka. (QS. 5: 8; 7: 29; 60: 8). Tuhan memerintahkan umat manusia tidak hanya untuk berlaku adil, tetapi juga berkata adil (Q.S. 6: 152), serta memutuskan perkara dengan adil (Q.S. 4: 58).. Jadi, adil harus dimulai sejak dalam pikiran.

Kelima, penghargaan atas hak asasi manusia. Islam diturunkan ke dunia dimaksudkan untuk memuliakan manusia, mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan di antara mereka, serta memberi kemudahan dalam kehidupannya. Untuk mewujudkan cita-cita luhur itu, Islam memberikan jaminan dasar yang meliputi lima hal: jaminan atas keselamatan atau kebebasan bergama dan berkeyakinan

(*hifz ad-din*); jaminan atas jiwa dan keselamatan fisik (*hifz an-nafs*); jaminan atas keselamatan keluarga dan keturunan (*hifz an-nasl*). Keempat, jaminan atas profesi dan hak milik pribadi (*hifz al-mal*); dan jaminan atas keselamatan akal atau kebebasan berpikir dan berekspresi (*hifz al-'aql*).

Ulama terdahulu merumuskan kelima jaminan dasar itu sebagai tujuan syariat (*maqashidusy syari'ah*), di mana segala tindakan yang melindungi kelima hal itu adalah bagian dari ajaran agama yang hakiki, sementara segala tindakan yang mengingkari kelima hal tersebut adalah kemadlaratan yang bertentangan dengan agama. Itulah fondasi agama dalam menata kehidupan masyarakat bangsa yang berperspektif HAM. Jadi, sesungguhnya Islam mempunyai *concern* yang sangat tinggi terhadap masalah HAM. Islam sangat menentang tindakan yang melawan HAM, termasuk tindak kekerasan dan memaksakan kehendak terhadap orang atau kelompok lain.

2. Pendidikan Karakter

Karakter, berasal dari Bahasa Yunani yang berarti "*to mark*" (menandai), memfokuskan

pada bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan. Apabila ada orang yang berperilaku tidak jujur, bertindak kejam atau rakus maka ia disebut orang yang berkarakter jelek. Begitu pula sebaliknya. Jadi karakter erat kaitannya dengan kepribadian. Individu disebut orang yang berkarakter (*a person of character*) jika tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral.

Menurut T. Ramli (2003), pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa

Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda. Yahya Khan (2010:1), dalam pada itu, mengatakan bahwa bahwa pendidikan karakter mengajarkan kebiasaan cara berPikir dan perilaku yang membantu individu untuk hidup dan bekerja sama sebagai keluarga, masyarakat, dan bernegara dan membantu mereka untuk membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen (pemangku pendidikan) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh warga sekolah/lingkungan. Di samping itu, pendidikan karakter dimaknai sebagai suatu perilaku warga sekolah yang dalam menyelenggarakan pendidikan harus berkarakter.

Dari beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah

suatu sistem penanaman nilai-nilai cara berfikir dan berakhlak di dalam kehidupan sehari-hari yang bertujuan untuk membentuk pribadi anak agar mampu bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat. Lebih dipertegas lagi oleh Ratna Megawangi (2004:105) “Pendidikan karakter ini merupakan cara yang paling efektif membentuk perilaku seseorang, yaitu sesuai atau mengacu kepada standar nilai-nilai moral yang mana semua kelompok masyarakat mengakui nilai-nilai kebenaran tersebut”.

Menurut Ratna Megawangi dalam bukunya *Menyemai Benih Karakter* (2017), ada sembilan karakter mulia yang selayaknya diajarkan kepada anak Indonesia: cinta Tuhan dan kebenaran (*love Allah, trust, reverence, loyalty*); tanggungjawab, kedisiplinan, dan kemandirian (*responsibility, excellence, self reliance, discipline, orderliness*); amanah (*trustworthiness, reliability, honesty*); hormat dan santun (*respect, courtessy, obedience*); kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama (*love, compassion, caring, empathy, generosity, moderation, cooperation*); percaya diri, kreatif,

dan pantang menyerah (*confidence, assertiveness, creativity, resourcefulness, courage, determination and enthusiasm*);
 7. Keadilan dan kepemimpinan (*justice, fairness, mercy, leadership*);
 baik dan rendah hati (*kindness, friendliness, humility, modesty*);
 toleransi dan cinta damai (*tolerance, flexibility, peacefulness, unity*).

Sebagai perbandingan, Deklarasi Aspen menghasilkan enam nilai etik utama (*core ethical values*) yang disepakati untuk diajarkan dalam sistem pendidikan karakter di Amerika. Keenam nilai ini meliputi: dapat dipercaya (*trustworthy*) yang di dalamnya mencakup sifat jujur (*honesty*) dan integritas (*integrity*); memperlakukan orang lain dengan hormat (*treats people with respect*); bertanggungjawab (*responsible*); adil (*fair*); kasih sayang (*caring*); dan warganegara yang baik, *good citizen*. (Hayani, 2020)

Karakter juga berhubungan dengan keberhasilan akademik anak. Menurut Dorothy Rich (1997) terdapat nilai (*values*), kemampuan (*abilities*) dan mesin dalam tubuh (*inner engines*) yang dapat dipelajari oleh anak dan berperan amat penting untuk mencapai kesuksesan

di sekolah dan di masa mendatang. Menurut Rich, hal-hal berikut ini, yang dia namakan *Mega skills*, dapat dipelajari dan diajarkan oleh orangtua maupun sekolah, yakni: percaya diri (*confidence*); motivasi (*motivation*); usaha (*effort*); tanggung jawab (*responsibility*), inisiatif (*initiative*), kemauan kuat (*perseverance*), kasih sayang (*caring*), kerja sama (*team work*), berpikir logis (*common sense*), kemampuan memecahkan masalah (*problem solving*), dan berkonsentrasi pada tujuan (*focus*). Sementara itu, Kemendiknas (sekarang Kemendikbud, 2011:8) menetapkan 18 nilai-nilai yang dikembangkan dalam pembelajaran di sekolah. Ke-18 nilai tersebut adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.

Pendidikan karakter memang sarat nilai. Jika kita berpegang pada idealisme kemanusiaan, nilai merupakan kekuatan penggerak perubahan sejarah. Kemampuan

membentuk diri dan mengaktualisasikan nilai-nilai etis merupakan ciri hakiki manusia. Karena itu, manusia mampu menjadi agen perubahan sejarah. Jika kita meyakini bahwa manusia merupakan agen bagi perjalanan sejarahnya sendiri, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak optimistis dalam melakukan berbagai lompatan sejarah sehingga kita mampu keluar dari kungkungan kemiskinan, keterbelakangan, dan berbagai keterpurukan lainnya.

Pendidikan karakter masih memiliki tempat bagi optimisme idealis pendidikan di Tanah Air, terlebih karena bangsa kita kaya akan tradisi religius dan budaya. Dengan modal religiusitas yang kuat, kita berkeyakinan bahwa manusia Indonesia memiliki dorongan yang kuat untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat, dan mampu membangun kehidupan bersama dengan saling menghargai satu sama lainnya.

Bila dikaitkan dengan pembangunan karakter bangsa, pendidikan bisa diartikan sebagai suatu cara membangun dalam berkehidupan bersama (*learn to live together*), selain belajar untuk tahu

(*learn to know*), dan belajar untuk berbuat (*learn to do*). Jika dua unsur yang disebut terakhir lebih terarah membentuk *having*, agar sumberdaya manusia mempunyai kualitas pengetahuan dan keterampilan atau *skill*, maka unsur pertama lebih terarah kepada *being* menuju pembentukan karakter bangsa. Pembangkitan rasa nasionalisme, yang bukan ke arah nasionalisme sempit; penanaman etika berkehidupan bersama, termasuk berbangsa dan bernegara; pemahaman hak asasi manusia secara benar, menghargai perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendak, pengembangan sensitivitas sosial dan lingkungan dan sebagainya, merupakan beberapa hal dari unsur pendidikan melalui belajar untuk hidup bersama.

Selama ini pendidikan karakter dilaksanakan dalam empat pola. Pertama, pendidikan karakter berbasis nilai religus. Di sini nilai-nilai yang diajarkan dan ditamkan ke peserta didik bersumber dari ajaran Islam. Lazim disebut pendidikan akhlak, yang berkaitan dengan akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada orangtua, akhlak kepada sesama, dan akhlak terhadap lingkungan alam

sekitar. Menurut Yahya Khan (2010:2) beberapa hal yang diajarkannya kepada mereka antara lain: ajakan untuk selalu berpikir, memperkuat diri dengan nilai-nilai yang bertumpu pada aturan Tuhan yang termaktub dalam kitab suci; bagaimana menguasai perasaan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain; membuka diri terhadap hubungan saling mempedulikan antarsesama; mengembangkan diri untuk melayani dan memimpin. Kedua, pendidikan karakter berbasis nilai budaya, antara lain yang berupa budi pekerti, Pancasila, apresiasi sastra, keteladanan tokoh-tokoh sejarah dan para pemimpin bangsa. Ketiga, pendidikan karakter berbasis lingkungan (konservasi lingkungan). Keempat, pendidikan karakter berbasis potensi diri, yaitu sikap pribadi hasil proses kesadaran pemberdayaan potensi diri yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan (konservasi humanis). Dalam pelaksanaan, boleh jadi pendidikan karakter yang berbasiskan empat hal itu saling tumpang tindih, karena unsur di basis yang satu terdapat pula basis yang lainnya.

3. Membangun Karakter Islami

Dalam Alquran terdapat seruan kepada umat manusia untuk saling mengenali (*ta'āruf*) dan berbuat kebajikan (*iḥsān*). Hal ini berarti bahwa Islam mendorong kesadaran kepada para pemeluknya untuk hidup bersama, berdampingan dengan orang lain yang berasal dari budaya, kelompok etnik, dan agama yang berbeda, bekerja sama, menerima dan memberi, dan siap untuk berkorban. Setelah saling mengenali, langkah berikutnya adalah saling memahami (*tafāhum*). Hal ini akan memunculkan kesadaran bahwa nilai-nilai yang kita dan mereka miliki mungkin berbeda, dan kita dapat saling melengkapi, serta memberikan sumbangsih bagi hubungan yang dinamis dengan menegaskan bahwa orang lain yang berbeda dengan kita adalah teman kita. Berikutnya adalah saling menghormati (*takrīm*), di mana setiap orang atau kelompok orang harus bersedia untuk mendengar pandangan-pandangan dan suara-suara yang berbeda. Dalam hubungan antarmanusia (*hublum minannas*) juga dituntut adanya rasa saling percaya, berbaik sangka, dan bersikap toleran. Nilai-nilai semacam itulah yang mesti dikembangkan dalam tata pergaulan atau hubungan

antarseama a dalam masyarakat. Berikut ini adalah beberapa nilai-nilai dasar yang diangkat dari sumber utama ajaran Islam yaitu Quran dan Hadis yang bisa direkonsurksikan sebagai unsur-unsur karakter Islam dalam rangka merawat dan mengembangkan masyarakat multikultural Indonesia.

Pertama, religius (takwa, twakkal, ihlas). Seperti telah disebutkan religius menempati posisi pertama dari 18 karakter yang ditetapkan Kemendikbud yang mesti ditanamkan kepada anak didik. Sejatinya sikap religius bersifat personal, tetapi dalam Islam beragama secara tulus tidak cukup hanya dengan mengerjakan segi-segi formal keagamaan seperti shalat, puasa, haji dan lain-lain. Sebab, pelaksanaan ibadah tersebut harus diikuti wujud nyata yaitu berupa budi pekerti luhur. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dibangkitkannya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yaitu, yaitu untuk menyempurnakan berbagai keluhuran budi pekerti (*li utammima makarimal akhlaq*). Nabi juga menyatakan, bahwa di antara semua kualitas manusia tidak ada timbangan atau bobot nilai kebaikannya lebih beat daripada akhlak yang mulia; dan yang paling banyak menyebabkan manusia masuk

surga adalah takwa kepada Allah dan keluhuran budi. (Nurcholish Madjid dalam Munawar-Rachman, 1994:452-456). Dalam Islam, selain takwa yang menjadi simpul keagamaan pribadi adalah tawakkal dan ikhlas (Nurcholish Madjid, 1992: 41)

Jadi, dalam kaitan ini, Nurcholish menegaskan bahwa Islam mengajarkan “formalitas ritual belaka tidaklah cukup sebagai wujud keberagamaan yang benar.... Justru sikap-sikap membatasi diri hanya kepada ritualistik dan formal akan sama dengan peniadaan tujuan agama yang hakiki.” (Munawar-Rachman, 1994: 454). Dengan lain perkataan, kesalehan individual harus diikuti dengan kesalehan sosial. Bahkan Allah mengecam sikap keagamaan yang tidak memiliki komitmen terhadap keadilan sosial (Q. 107:1-7).

Dalam konteks pendidikan karakter di sekolah, keberagamaan atau religisitas yang ditanamkan kepada kepada peserta didik tidak hanya berupa doktrin-doktrin keimanan dan praktik-praktik ibadah, tapi juga harus dilakukan pembiasaan agar mereka memiliki kepekaan dan kepedulian sosial.

Kedua, toleransi (*tasamuh*). Ini adalah sikap apang dada terhadap

penganut agama lain untuk menyatakan dan menerapkan keimanannya. Dengan demikian, seorang muslimin dan komunitas muslim harus menganut pola hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*) dengan komunitas-komunitas lain yang berbeda agama.

Toleransi adalah prinsip yang niscaya dalam sebuah masyarakat yang majemuk dan multikultur. Tanpa toleransi, masyarakat akan selalu berada dalam suasana konflik yang destruktif, saling bermusuhan, penuh arogansi dan tidak stabil. Toleransilah yang bisa membuat perbedaan menjadi kekuatan, mentransformasikan keragaman menjadi keharmonisan. Toleransi memungkinkan masyarakat plural bergerak maju secara dinamis dalam situasi sosial yang damai dan stabil.

Dalam pandangan Islam, toleransi merupakan sebagai titik tolak yang penting dalam membangun perdamaian (*salam*). Al-qur'an mengajarkan bagaimana membangun perdamaian di tengah masyarakat yang memiliki umat beragama yang berbeda-beda, dan mengakui perbedaan keyakinan dan budaya. Islam menekankan betapa pentingnya pemeliharaan hubungan yang baik

antara penganut agama yang berbeda karena, sebagaimana ditekankan oleh Alquran, kebebasan agama merupakan pondasi bagi perdamaian yang berkelanjutan. Al-qur'an menyeru semua orang yang beriman untuk masuk ke dalam perdamaian dan tidak mengikuti langkah setan (Q.S.2: 208).

Alquran memberikan landasan yang kuat bagi toleransi. Hal ini dapat dilihat dalam surat al-Isrā' ayat 70 yang menegaskan bahwa manusia diberikan posisi yang mulia di antara makhluk ciptaan-Nya. Ini diikuti oleh tanggung jawab untuk memelihara semua ciptaan oleh manusia sebagai khalifah di muka bumi. Surat al-Mā'idah ayat 32 dan al-An'ām ayat 98 yang berbicara tentang kesamaan asal muasal manusia yang membuat semua manusia saling berhubungan. Oleh karena itu, meskipun ada perbedaan-perbedaan, berbagai macam kelompok etnik dan keagamaan didorong untuk melihat gambaran yang lebih besar dan melampaui loyalitas-loyalitas 'kesukuan' yang memisahkan mereka. Toleransi berhubungan dengan keadilan dan persamaan. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berlaku adil terhadap manusia, dan teladan ini harus diikuti oleh umat Islam (Q.S. 4:

135; 5: 8; 60: 8). Namun demikian, tidak seorang manusia pun yang mampu dan berada dalam posisi menilai orang lain. Penilaian itu adalah milik Allah sendiri dan masing-masing akan mendapatkan pahala dari Allah berdasarkan hasil kerja mereka. Penekanan terhadap keadilan tidak meletakkan batasan-batasan pada toleransi terhadap yang lain, bahkan mereka yang melanggar hak-hak orang lain. Oleh karena itu, toleransi sebagaimana yang diisyaratkan oleh Alquran sesungguhnya merupakan permulaan untuk mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan antara berbagai komunitas yang berbeda. Selanjutnya, Alquran menyerukan untuk terlibat dalam dialog dengan yang lain, khususnya *ahlul -kitāb*. Misalnya, Alquran surat Āli ‘Imrān ayat 64 menginstruksikan kepada umat Islam dan ahl al-kitāb untuk kembali kepada kalimat yang sama (*kalimah sawā’*) atau *common platform* yaitu “tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya.” Dalam berdialog, Alquran menganjurkan untuk menggunakan metode hikmah dan nasehat yang baik (Q.S. 16: 125). Berdasarkan hal ini, maka pemaksaan terhadap kelompok agama yang lain

menjadi tidak dibenarkan. Sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 256, “*Laa ikraaha fid-diin*, artinya tidak ada paksaan dalam agama.” (Rusli, 2012:115)

Menurut As’ad Said Ali (2009: 147), terciptanya *tasamuh* dalam kehidupan beragama dan bersuku-bangsa akan meminimalisasi terjadinya politisasi dan radikalisme adagama. Jika kebergamaan tidak memiliki nilai-nilai *tasamuh*, kata dia, hal itu akan mengarah dan membentuk fanatisme yang berlebihan. Nilai ini pada dasarnya sudah menjadi bagian dari tradisi kehidupan masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Namun demikian, kenyataan menunjukkan akhir-akhir ini di negara kita kerap muncul peristiwa-peristiwa intoleransi keagamaan.

Sementara itu, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur (1991) mengusulkan apa yang dia sebut sebagai toleransi plus. Menurut dia, “hidup berdampingan secara damai” (*peaceful coexistence*), yaitu hidup bersama dalam suasana saling menghormati dan menghargai, dengan penganut agama yang berbeda, tidak cukup, karena hal demikian masih sangat rentan terhadap munculnya kesalahpahaman antar-kelompok

masyarakat yang pada saat tertentu bisa menimbulkan disintegrasi. Penghormatan dan penghormatan terhadap agama orang lain harus disertai kesediaan untuk menerima ajaran-ajaran yang baik dari agama dan peradaban lain itu sendiri. Gus Dur menyatakan bahwa ia akan menerima dan menyampaikan kebenaran yang datang dari manapun, apakah itu datang dari Injil, Bhagawad Gita, atau yang lain.

Kesediaan seperti itu tentu bukan hal yang mudah, apalagi bagi mereka yang beragama secara skriptural dan legal-formalistik. Karena kesediaan untuk menerima kebenaran dari agama lain dengan sendirinya merupakan keyakinan bahwa ada kebenaran di luar agama yang dianut. Level seperti ini tentu sesuatu yang tidak mudah dilampaui, kecuali bagi mereka yang benar-benar menghayati dan mengamalkan agama secara tulus, rendah hati dan benar-benar pasrah (*hanif*).

Ketiga, ta'aruf dan ta'awun. Seperti sudah disinggung bahwa pluralitas atau kemajemukan (*ta'addudiyah*) merupakan hukum alam (*sunnatullah*) yang tidak akan berubah dan tidak bisa ditolak. Telah dinyatakan dalam Alquran

menyatakan bahwa manusia diciptakan dalam berbagai bangsa dan suku ("Wahai sekalian umat manusia. Sesungguhnya Kami ciptakan kamu sekalian dari pria dan wanita, dan Kami jadikan kamu sekalian berbagai bangsa dan suku, ialah agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah kamu yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu Maha Tahu dan Maha Teliti." Q.S. 49:13), dan oleh karena itu kebhinekaan harus diterima sebagai kenyataan yang mesti dihargai dan dipandang secara optimistis dan positif sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah (30:22). Bahkan, Alquran menyatakan bahwa perbedaan pandangan tidak harus ditakuti atau ditiadakan tetapi justru harus dijadikan titik tolak untuk berkompetisi menuju kebaikan (QS. 5: 48). Dengan diciptakan manusia ke dalam berbagai bangsa, suku, ras, dan lain-lain, agar mereka menjalin hubungan dan saling kenal-mengenal (*ta'rauf*).

Taa'ruf berarti saling kenal satu sama lain, yang dicapai melalui proses komunikasi atau saling membuka diri, dalam rangka mencari persamaan-persamaan. Dari sinilah akan muncul kerja sama dan

solidaritas atau *ta'awun*. Dikemukakan As'ad Said Ali (2009:148):

Dalam *ta'aruf* berlangsung proses mengenal dan mengakui adanya perbedaan atau keragaman. Dalam tahap itu muncul sikap toleransi. Proses selanjutnya adalah usaha untuk saling berkomunikasi, dan bekerja sama demi kepentingan yang lebih besar, misalnya, urusan publik atau urusan kemanusiaan secara umum. Dari situ lahir solidaritas atau keseiakawanan yang lebih luhur... Kerja sama (*ta'awwun*) antara warga negara dan menghargai kemajemukan beragama diterima oleh umat Islam dengan semangat *ukhuwah*... Formulasi *ta'aruf* dapat berbentuk *ukhuwwah basyariyah* (persaudaraan seluruh umat manusia), *ukhuwwah wathaniyah* (persaudaraan kebangsaan), dan *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan umat Islam).

Keempat, persaudaraan (*ukhuwah*). Nilai dan semangat persaudaraan ini penting untuk ditanamkan sebagai bagian yang tak terpisahkan untuk membentuk karakter peserta didik yang islami. Di dalam Islam, mula-mula persaudaraan itu dibangkitkan di antara saudara-saudara seiman. Ajaran tentang *ukhuwah*

Isamiyyah paling jelas dan terurai dalam QS 49:10-14. (Madjid, 1992:174). Dalam ayat-ayat itu ditekankan bahwa kaum beriman itu bersaudara, di antara mereka tidak boleh saling menghina, sebab yang menghina belum tentu lebih baik dari yang dihina, tidak boleh saling mencela, tidak saling memanggil dengan panggilan yang buruk, menjauhi prasangka, dilarang saling memata-matai (mencari-cari kesalahan) serta saling mengumpat.

Setelah mengukuhkan persaudaraan sesama muslim, langkah berikutnya adalah mengembangkan sayap persaudaraan dengan kaum beragama lain, atau di dengan saudara-saudara sebangsa dan antara sesama umat manusia. Hal ini sesuai dengan misi Islam, sebagaimana yang dibawakan oleh Nabi, yaitu rahmat untuk sekalian alam. Oleh karena itu, dalam pergaulan dengan kaum agama lain pun, kaum muslimin diberi petunjuk Allah untuk bertindak penuh kebaikan dan keadilan, selama mereka tidak berbuat zalim. Dalam Q.S. 60: 8-9 Allah berfirman: "Allah tidak melarang kamu – berkenaan dengan mereka (golongan lain) yang tidak memerangi kamu dalam agama dan tidak mengusir kamu dari negeri-

negerimu – untuk berbuat baik kepada mereka itu dan berlaku adil terhadap mereka. Sungguh Allah cinta kepada mereka yang berlaku adil.”

Kelima, moderat (tawasuth). Secara etimologis *tawasuth* berarti tengah-tengah, tidak terlalu keras (fundamentalis) dan tidak terlalu bebas (liberal). Lawannya adalah *tathorruf* (ekstrem). Karakter ini bisa dirujuk pada Q.S. 2:143: “Dan demikianlah kami menjadikanmu (umat Islam), umat yang adil (tengah-tengah) dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.” Juga hadis Nab yang menyatakan, “Hal yang terbaik adalah yang tengahtengah (sedang).”

Sikap *tawasuth* yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi sikap adil (*adl*) dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama (*i'tidal*). Serta bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk ekstremitas (*tathorruf*). Karakter *tawasuth* dalam Islam adalah titik tengah diantara dua ujung, dan hal itu merupakan kebaikan yang sejak semula telah diletakkan Allah SWT. Menurut KH Achmad Shiddiq (2005) prinsip dan karakter

tawasuth yang sudah menjadi karakter Islam ini harus diterapkan dalam segala bidang, supaya agama Islam dan sikap serta tingkah laku umat Islam selalu menjadi saksi dan pengukur kebenaran bagi semua sikap dan tingkah laku manusia pada umumnya. Bentuk-bentuk sikap *tawasuth* yang perlu diajarkan kepada peserta didik antara lain: tidak bersikap ekstrem dalam berdakwah; Tidak mudah mengkafirkan sesama muslim karena perbedaan pemahaman agama; dan dalam kehidupan bermasyarakat memposisikan diri dengan berpegang pada persaudaraan dan toleransi baik antarsesama muslim, maupun dengan pengaut agama lain. (Thoah As'ad, 2013:11).

Keenam, tawazun. Dalam Q.S. 67:3 Allah berfirman: “Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?”

Menurut bahasa *tawazun* berarti keseimbangan atau seimbang. Yakni sikap seseorang untuk memilih titik yang seimbang atau adil dalam menghadapi suatu persoalan. Sikap ini

perlu ditanamkan kepada peserta didik sebagai bagian dari pembentukan karakter islami agar tidak melakukan sesuatu hal yang berlebihan dan mengesampingkan hal-hal yang lain atau malah melupakannya, padahal hal yang dimaksud itu memiliki hak yang harus ditunaikan pada diri kita. Dalam sebuah riwayat diceritakan Rasulullah s.a.w. kedatangan tiga orang sahabat, dan mereka mengutarakan maksudnya masing-masing. Orang yang pertama mengatakan bahwa dia tidak akan menikah selama hidupnya, kemudian orang yang kedua mengatakan bahwa dia akan berpuasa setiap hari dan terus-menerus seumur hidupnya, sedangkan yang ketiga mengatakan bahwa ia akan salat tanpa henti-hentinya. Rasulullah pun merespons dengan mengatakan: kalian jangan seperti itu, masing-masing urusan ada haknya, urusan dunia ada haknya sedangkan urusan akhirat ada juga haknya, jalankanlah hal itu dengan seimbang.

Menurut As'ad Said Ali, sikap *tawazun* diperlukan untuk memberi batasan kepada kebebasan (liberalisme) agar tidak *kebablasan*. Sebagai makhluk sosial, seorang individu memiliki kebebasan, tapi ia juga harus menjaga atau menghormati

kebebasan individu lain. Banyak segi-segi dalam kehidupan yang memerlukan keseimbangan agar tidak berujung pada fanatisme, ekstremisme dan radikalisme. Bahkan dalam ajaran Islam, antara kepentingan akhirat dan kepentingan dunia harus dijalankan secara seimbang. Hubungan antara manusia dan Tuhan, dan hubungan antara sesama manusia juga harus seimbang. (As'ad Said Ali, 2009:149-150_.

D. KESIMPULAN

Kebhinekaan atau pluralitas merupakan sunnatullah yang harus diterima dengan sikap positif dan penuh optimisme. Oleh karena itu, dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, perlu dibangun atau ditumbuhkan sikap-sikap warga negara dalam proses menuju masyarakat multikultural, yang tidak hanya harus hidup berdampingan tapi juga bisa saling mengenal satu sama lain, dan menjalin kerja sama dalam urusan publik dan kemanusiaan. Untuk itulah perlu ditanamkan nilai-nilai dan sikap yang membentuk karakter seorang muslim. Unsur-unsur karakter islami ini, sebagaimana telah dipaparkan, harus menjadi bagian dari isi Pendidikan Agama Islam, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan akhlak peserta didik.

Pendidikan karakter islami ini menjadi relevan ketika dihadapkan dengan masyarakat Indonesia yang majemuk, dan karena itu rawan konflik.

REFERENSI

- Abdillah, Masykuri. 1997. *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim*
- Abdullah, Irwan Kondisi Sosial yang Dibayangi Disintegrasi Tanpa Ujung" dalam Ninok
- Ali, As'ad Said, *Negara pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Jakarta: Ip#es, 2009
- Azra, Azyumardi, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*, Yogyakarta, Impulse 2007.
- Budiman, Hikmat (Ed.), *Hak Minoritas: Ethnos, Demos dan Batas-Batas Multikulturalisme*,
- Hayani, Amalia "Membangun Karakter pada Anak Usia Dini", Makalah disampaikan pada kegiatan Sarasehan Akbar HIMPAUDI Kota Cilegon, Februari 2020 *Indonesia terhadap Konsep Demokrasi(1966-1993)*. Yogyakarta: Tiara Wacana Jakarta: Interseksi, 2009.
- Kemendiknas, *Pembinaan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama*, Jakarta:2010
- Khan, Yahya, *Pendidikan Karakter Berbasis Diri*, Yogyakarta: Pustaka Publishing, 2010
- Leksono (ed) *Indonesia Abad XXI: di Tengah Kepungan Perubahan Global* . Jakarta: 2000
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah keimanan, kemanusiaan dan Kemoderanan*. Jakarta:
- Megawangi, Ratna, *Pendidikan Karakter untuk Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Institut Pengembangan Pendidikan Karakter, 2010
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Perss, 1995.
- Rachman, Budi Munawar (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1994
- Ramli, T, *Pendidikan Moral dalam Keluarga*, Jakarta: Grasindo, 2003
- Rusli, "Multikulturalisme dalam Wacana Al-Qur'an, " *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 9, No. 1, Juni 2012: 105-120
- Siddik Achmad, *Khiitah Nahdliyyah*, Surabaya: Khalista-LTNU, 2005
- Thoha, As'ad, *Pendidikan Aswaja da Ke-NU-an untuk MA/SMA/SMK Kelas 12*, Jawa Timur: PWLP Ma'arif, 2013
- Wahid, Abdurrahman, "Intelektual di Tengah Eksklusivisme," *Prisma*, No. 3, Maret 1991
- Yayasan wakaf Paramadina, 1992